

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam membahas judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur” terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Siti Taslimatul Umah dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kewirausahaan Kerajinan Tangan Oleh Karang Taruna GJ Makmur Di Desa Goras Jaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah*” pada tahun 2019, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memberikan gambaran dan data lengkap yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses karang taruna GJ Makmur saat memberdayakan pemuda dengan pengembangan kewirausahaan melalui kerajinan tangan di Desa Gores jaya Lampung Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan kewirausahaan ini dapat memberdayakan masyarakat karena masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Gores Jaya menjadi penghasilan untuk para masyarakat desa setempat.
2. Penelitian Suhermanto dengan judul “*Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil, Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan*

Perdagangan Kabupaten Maros” pada tahun 2020, penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan gambaran dan data lengkap yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang ditemukan bahwa pemberdayaan UKM di Kabupaten Maros tidak berjalan optimal, karena adanya kendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UKM sehingga pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan berjalan kurang optimal.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Maulana dengan judul *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pelatihan Teknik Sepeda Motor Unit Balai Latihan Kerja Provinsi Jawa Barat”* pada tahun 2018, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan pelatihan serta pelaksanaannya yang diperoleh dari wawancara dengan pihak BLK Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas, teori pemberdayaan masyarakat, serta teori pelatihan dan keterampilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para lulusan program ini menjadi terampil dan memiliki skill yang baik, sehingga membantu para lulusan untuk masuk ke dunia kerja maupun membuka usaha sendiri.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Siti Taslimatul Umah	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kewirausahaan Kerajinan Tangan Oleh Karang Taruna GJ Makmur Di Desa Goras Jaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program tersebut dapat memberdayakan masyarakat karena masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Gores Jaya menjadi penghasilan untuk para masyarakat desa setempat.	Peneliti terdahulu membahas mengenai pengembangan kewirausahaan kerajinan tangan oleh Karang Taruna GJ Makmur dengan menggunakan tiga tahapan indikator keberhasilan, yaitu tahap penyadaran, tahap kapasitas, tahap pendayaan.
2.	Suhermanto	Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil, Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UKM di Kabupaten Maros tidak berjalan optimal, karena terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UKM sehingga pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan berjalan kurang optimal.	Penelitian terdahulu membahas mengenai pemberdayaan pelaku usaha kecil, menengah pada dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan Kabupaten Maros, dengan menggunakan tiga tahapan indikator keberhasilan pemberdayaan UKM, yaitu fase inisil, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris.

3.	Muhammad Iqbal Maulana	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pelatihan Teknik Sepeda Motor Unit Balai Latihan Kerja Provinsi Jawa Barat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para lulusan program ini menjadi terampil dan memiliki skill yang baik, sehingga membantu para lulusan untuk masuk di dunia kerja maupun membuka usaha sendiri.	Penelitian terdahulu membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan pelatihan teknik sepeda motor unit Balai Latihan Kerja Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan dua teori untuk menentukan indikator keberhasilan pada program tersebut, yaitu teori efektivitas dan pemberdayaan masyarakat.
----	------------------------	--	--	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Hendrawati Hamid mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti yang diambil dari terjemahan bahasa Inggris “*empowerment*”, secara keseluruhan maknanya, yaitu daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum memiliki kekuatan daya untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.¹

¹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018) h. 9

Seseorang atau masyarakat dikatakan berdaya ketika mereka memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Pemberdayaan adalah upaya perubahan seluruh potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi serta untuk memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat di dalam semua aspek kehidupan. Proses pemberdayaan dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kekuatan serta kemampuan kepada pihak yang belum mempunyai kekuatan atau kemampuan.

Pemberdayaan adalah suatu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berlandaskan pada asas kerakyatan. Pemberdayaan terjadi melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada suatu kelompok.²

Menurut Munawar Noor, pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih berada digaris kemiskinan dan keterbelakangan.³ Oleh sebab itu diperlukan langkah awal atau dasar untuk memberdayakan masyarakat, langkah tersebut dengan penguatan ekonomi serta pematangan budaya dan pematapan agama.

Sementara itu pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian penegakan kegiatan ekonomi yang berlangsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang berarti bukan hanya sebuah konsep ekonomi apabila menilik dari sudut pandang penyelenggaraan administrasi publik. Hal ini berarti konsep ekonomi yang

² Saifuddin dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), h. 3

³ Munawar Noor (2011), *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, h. 89

dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar dan keterampilan manajemen. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan dengan melalui;

1. Penyediaan sarana dan prasarana fisik, yang dikhususkan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor lingkungan usaha
2. Fasilitas percepatan pembangunan di wilayah desa dan kota
3. Fasilitas pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi
4. Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat dalam hal kewirausahaan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya khusus yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam pembuatan program untuk membangun potensi masyarakat dari yang lemah menjadi berdaya atau kuat dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik yang dikarenakan oleh kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial

yang tidak berlaku adil).⁴ Tujuan lain pemberdayaan masyarakat adalah untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri yakni masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri. Kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga secara sosial, budaya, hak bersuara dan berpendapat, dan hak politiknya. Oleh karena itu pada dasarnya kemandirian masyarakat adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh masyarakat dan ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dianggap tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tujuan pemberdayaan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kapasitas kehidupan masyarakatnya dengan mengembangkan kemandirian masyarakat, meningkatkan keswadayaan masyarakat, dan mengembangkan jaringan kerja masyarakat agar masyarakat mampu mengakses sumber informasi untuk memperoleh dan memanfaatkan hak ekonomi, sosial dan politik serta untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Menurut Mardikanto dalam Hendrawati Hamid (2018) tujuan dari pemberdayaan terdiri tujuh hal:

⁴ Hendrawati Hamid, *Op.cit.*, h. 12

1. Perbaikan Pendidikan

Perbaikan pendidikan dalam pemberdayaan tidak hanya sebatas pada perubahan materi, perbaikan metode pembelajaran, dan hubungan fasilitator dengan penerima manfaat. Namun seharusnya mencari cara agar perbaikan pendidikan normal dalam proses pemberdayaan dapat menumbuhkan semangat dan keinginan masyarakat untuk terus mencari ilmu dan pengetahuan tanpa adanya batas waktu dan usia.

2. Perbaikan Kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau dinas tertentu akan memperbaiki kelembagaan dengan begitu program kerjanya akan terarah serta memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Kelembagaan masyarakat mudah mencapai tujuannya apabila masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan lembaganya. Perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki tindakan yang dilakukan masyarakat. Dengan begitu setiap masyarakat yang terlibat dalam lembaga merasa berkemampuan dan memiliki peran untuk memajukan lembaganya dengan saling memberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

3. Perbaikan Usaha

Perbaikan kelembagaan diharapkan mampu memperbaiki bisnis atau usaha milik lembaga itu. Apabila bisnis di kelembagaan masyarakat

sudah baik maka mampu memberikan kepuasan bagi semua anggotanya dan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat disekitar lembaga.

4. Perbaikan Pendapatan

Suatu lembaga akan dikatakan baik apabila bisnisnya menghasilkan pendapatan yang cukup untuk lembaga tersebut. Dengan perbaikan bisnis diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi semua anggotanya sehingga mampu memperbaiki keluarga para anggotanya kearah yang lebih baik.

5. Perbaikan Lingkungan

Saat ini kerusakan lingkungan secara tidak langsung dilakukan secara sadar oleh manusia. Hal ini didasari demi memenuhi kebutuhan hidupnya karena kondisi kemiskinan di masyarakat. Maka dari itu seharusnya pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya agar tercukupi dengan baik, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia.

6. Perbaikan Kehidupan

Apabila pendapatan sudah membaik maka akan berimplikasi dengan membaiknya lingkungan fisik dan sosial yang pada akhirnya akan memperbaiki kehidupan keluarga seluruh anggotanya.

7. Perbaikan Masyarakat

Membaiknya kehidupan keluarga seluruh anggotanya berarti didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang baik, dengan begitu diharapkan dapat menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan pemberdayaan manusia yakni untuk menjadikan masyarakat memiliki kemampuan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk mencapai hasil yang maksimal, tentunya dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi dengan begitu akan terlaksana dengan baik kerjasama antara masyarakat dan institusi pembuat program pemberdayaan.

2.2.3 Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Soekanto dalam (Maryani & Nainggolan) tahapan pemberdayaan masyarakat terbagi dalam tujuh tahapan dan langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini terdapat dua tahapan yang harus dilakukan, pertama mempersiapkan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat dan kedua adalah mempersiapkan lapangan atau tempat dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan. Tahapan ini sangat penting dilakukan karena

⁵ Hendrawati Hamid, *Op.Cit*, h.13-14

menyangkut keberhasilan suatu kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat.

2. Tahap Pengkajian

Dalam tahapan ini petugas berupaya untuk mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Proses pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan. Proses pengkajiannya dilakukan secara individual melalui kelompok yang diberdayakan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Di tahap ini petugas pemberdayaan mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir mengenai masalah yang sedang dihadapi dan mencari cara untuk mengatasi masalahnya. Disini masyarakat diharapkan mampu memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif tersebut harus dapat menggambarkan kekurangan dan kelebihan, sehingga alternatif program yang dipilih nantinya dapat menunjukkan kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

4. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini petugas membantu seluruh kelompok untuk merumuskan dan menentukan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Petugas juga harus membantu

untuk memformulasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan begitu penyandang dana mengetahui maksud tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.

5. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Untuk itu kerjasama antara petugas dan masyarakat sangat penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan. Pada tahap ini, seluruh peserta kegiatan diharapkan mampu memahami dengan jelas maksud, tujuan dan sarannya, maka sebelum kegiatan dimulai diperlukan sosialisasi, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. Program ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk waktu jangka panjangnya dapat membangun komunitas masyarakat yang mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Di Tahap evaluasi ini dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan kegiatan ini dapat tercapai, sehingga kendala

dan hambatan yang terjadi dapat diprediksi terlebih dahulu untuk periode selanjutnya.

7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pada tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan bagi dirinya serta keluarganya.⁶

2.2.4 Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Prayanka dan Priyono dapat dilakukan melalui 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase Insial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini pemerintah yang berperan penuh untuk masyarakat, sehingga masyarakat melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat yang ada. Adapun yang menjadi indikator dalam proses pemberdayaan pada tahapan ini, yaitu:

⁶ Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E., *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 13-14

- a. Pelatihan adalah suatu aktivitas untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mengalokasikan anggaran sebagai investasi. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera menggunakannya dalam pekerjaan. Pada dasarnya pelatihan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan bekerja sehingga menghasilkan produktivitas kerja.
 - b. Penyuluhan adalah penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja baru atau mengenai fasilitas baru sehingga tidak terjadi kesalahan dan pelaksanaan program atau tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program atau tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan fasilitas.
 - c. Kebijakan adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur program kerja dari tiap divisi atau organisasi dibawahnya agar tidak bertentangan dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri.
2. Fase Partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Adapun yang menjadi indikator dalam fase ini adalah:
- a. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program
Keaktifan masyarakat ketika ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar bisa mengetahui sejauh mana hubungan antara

pemerintah dan masyarakat, saling mendukung atau saling menjatuhkan.

b. Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan

Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi masyarakat sangat dibutuhkan ketika masyarakat sudah bertindak acuh tak acuh kepada kesejahteraan hidupnya, maka akan dipertanyakan nasib kedepannya. Masyarakat bisa memberikan usulan dan pendapat mereka ke pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain memberi pendapat masyarakat juga diharapkan mampu menemukan solusi dari setiap kendala yang menghambat perkembangan sumber daya.

3. Fase Emansipatoris, proses pemberdayaan berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan dirinya, dan dapat melakukan pembaruan dalam mengaktualisasikan diri.⁷

2.2.5 Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan merupakan terjemahan dari kata “*training*” dalam bahasa Inggris. Secara bahasa asal kata “*training*” adalah “*train*”, artinya memberi pelajaran dan praktik, menjadi berkembang dalam arah yang dikehendaki, persiapan dan praktik. Andrew E. Sikula mengemukakan pelatihan sebagai suatu proses pendidikan

⁷ Priyono, Onny dan Pranaka, A.M.W, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), h. 89.

jangka pendek mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan terbatas.⁸ Pelatihan memiliki manfaat bagi kelompok masyarakat, dimana kegiatan pelatihan yang diberikan dapat memberikan beberapa manfaat yakni:

1. Membantu masyarakat guna mempercepat pemenuhan kebutuhan sebagai upaya memperbaiki taraf hidup,
2. Memperbaiki sikap-sikap agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga mampu membuat keputusan dengan baik dan benar,
3. Meningkatkan motivasi untuk belajar, dan senantiasa untuk bersedia dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya,
4. Menumbuhkan rasa percaya diri dan solidaritas yang tinggi didalam hubungan bermasyarakat,
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas,
6. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan setiap individu untuk mencapai standard-standar kinerja yang dapat diterima,
7. Menciptakan sikap, loyalitas, kerja sama yang lebih menguntungkan,
8. Memenuhi persyaratan-persyaratan perencanaan sumber daya manusia,
9. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja,
10. Membantu setiap individu dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelatihan memberikan manfaat untuk memperbaiki kinerja bagi para peserta.

⁸ Gatingsih, Eko, *Op.cit.*, h. 172

Kewirausahaan merupakan terjemahan dari kata “*entrepreneur*” dalam bahasa Perancis. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasikan sumber, mengelola sehingga peluang tersebut menjadi salah satu usaha yang mampu menghasilkan keuntungan dengan jangka waktu yang lama.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang berproses dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan seseorang dalam kreativitas, inovasi dan memiliki keberanian untuk menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara bekerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru.



2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

